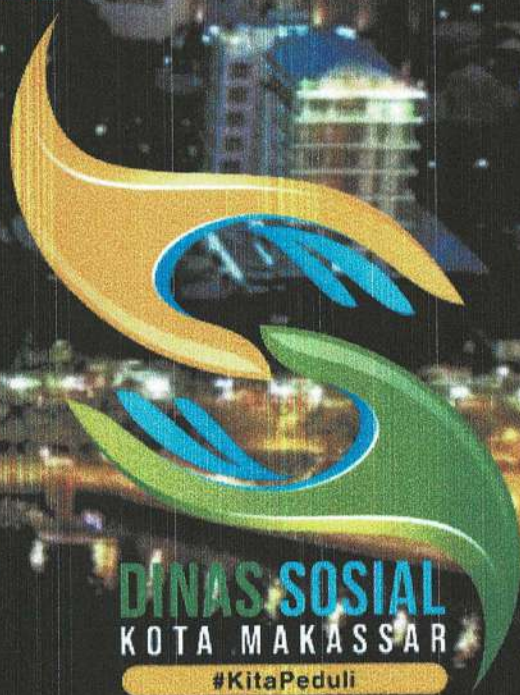


RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 2511/050.13/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2023 dalam Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

22. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Agustus 2022

WALI KOTA MAKASSAR,

Moh. Ramdhan Pomanto
MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar;
7. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 2511/050-13/TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN
2023.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
5.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
6.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
8.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
10.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
11.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
12.	Dinas Sosial Kota Makassar
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
14.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar
15.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
20.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
21.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
22.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
23.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
24.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
25.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
29.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
33.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
34.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
35.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
36.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
37.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
38.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
39.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
40.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
43.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
44.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
45.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
46.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
47.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
48.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
49.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
50.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
51.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar



WALI KOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD.....	10
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD	40
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI OPD....	44
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD.....	46
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	67
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	69
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	69
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH....	73
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	74
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	93
BAB V PENUTUP.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	24
Tabel T-C.30	42
Tabel T-C.31	48
Tabel T-C.32	68
Tabel T-C.33	78
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja PD dilakukan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kota/Kabupaten, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Penyusunan Renja PD berpedoman pada arah kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyusunan Rancangan Awal Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksistensi PD, evaluasi pelaksana Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

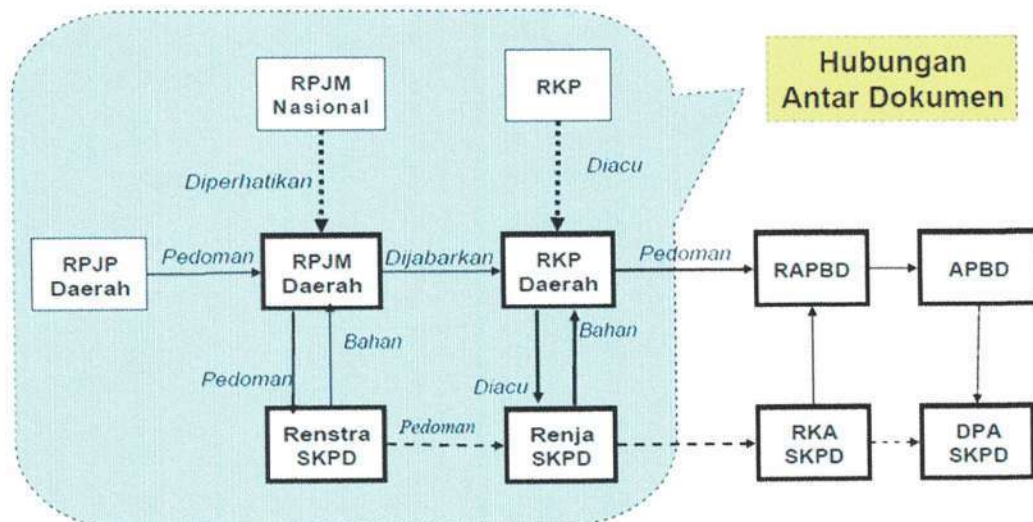
Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja

PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan rancangan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 1.1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Proses pengesahan Renja PD dilakukan 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah pengesahan Renja PD, maka akan dilanjutkan dengan proses penyusunan RAPBD sehingga Renja PD merupakan dasar dalam RKA SKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Makassar 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Disabilitas;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
19. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tahun Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
 28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 tanggal 26 Agustus 2021 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
 29. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 89);
 30. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);

31. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 tanggal 28 September 2021 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);
34. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Makassar;
35. Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Dengan dasar Hukum ini, memberikan konsekuensi terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dapat menyusun Rencana Kerjanya. Program dan kegiatan setiap tahun dengan parameter yang terukur dan dapat dilaksanakan untuk menjawab berbagai permasalahan sesuai dengan kemampuan anggaran yang diselaraskan dengan Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya. Oleh karena itu dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kota Makassar maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2023 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kota Makassar di tahun 2021-2026 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2023 ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial Kota Makassar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Sosial dan RPJMD Kota Makassar di tahun 2023;
- b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan laporan kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Merupakan kumpulan yang memuat tentang undang-undang serta peraturan yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Berisi penjelasan yang memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Makassar 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta memuat susunan secara garis besar dari dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Makassar tahun lalu dan perkiraan yang akan dicapai pada tahun ini, mengacu pada APBD ini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Poin ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditentukan dalam NSPK, SPM, serta terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Sosial

Berisikan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tupoksi Dinas Sosial Kota Makassar yang terurai pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan terjawab pada program dan kegiatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Berisikan uraian terkait proses penyandingan analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta temuan-temuan yang didapat setelah proses tersebut dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Poin ini mengurai hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD yang langsung dtujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrembang Kota dan Pokir DPRD Kota Makassar.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisi Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tupoksi dari Dinas Sosial Kota Makassar.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Poin ini membahas terkait penetapan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Kota Makassar 2021-2026.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Makassar yang berdasarkan pada faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang meliputi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Pada tahun 2021, Dinas Sosial Kota Makassar melaksanakan 7 (tujuh) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 43 sub kegiatan. Dari keseluruhan total program, terdapat 6 (enam) program utama dan 1 (satu) program penunjang/pendukung. Besaran anggaran yang dikelola Dinas Sosial Kota Makassar pada APBD Pokok yaitu Rp. 18.070.000.000,-.

Realisasi capaian target kinerja tahun 2021 yaitu 80% sedangkan realisasi keuangan adalah 71% yaitu Rp. 12.793.174.554,-. Dinas sosial diamanatkan 2 (dua) program yang di dalamnya terdapat kegiatan Standar Pelayanan Minimal dengan capaian kinerja yaitu 100% dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu (1) kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan sub kegiatan Pemberian Alat Bantu, sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, dan sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan; (2) kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, dan sub kegiatan Layanan Rujukan. Indikator capaian berupa persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dengan target kinerja 100%. Anggaran program ini yaitu Rp.2.443.926.524,37,-. Realisasi anggaran Rp.

1.933.348.446,- (79%), dengan rincian realisasi pada triwulan I Rp. 65.208.640,-, triwulan II Rp.150.712.424,-, triwulan III Rp. 231.166.020,-, dan triwulan IV Rp.1.587.888.126,-. Capaian kinerja yang diperoleh di tahun 2021 yaitu 100% dengan jumlah 83 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) telah dijangkau dan telah diberikan rehabilitasi, 550 orang eks kusta telah mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dan 50 orang keluarga penyandang disabilitas terlantar berat telah mendapatkan bimbingan sosial.

Selanjutnya, 9 (sembilan) orang lansia terlantar yang dijangkau dan diberikan rehabilitasi dengan rincian 7 (tujuh) orang dipulangkan ke pihak keluarga dan 2 (dua) orang dirujuk ke PSTW Baji Mappakasunggu Pare-Pare.

Selain itu, di tahun 2021 jumlah PMKS jalanan yang diberikan pelayanan di UPTD RPTC yaitu 21 orang PMKS. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa pemberian makanan, pemberian pakaian yang layak, asesmen oleh peksos serta pemberian bimbingan fisik, mental dan sosial.

Tim reaksi cepat (TRC) Sari'battang juga telah menjalankan penertiban dengan hasil jangkauan sebanyak 480 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan. Hasil penjangkauan tersebut merupakan hasil jangkauan langsung baik yang dilaksanakan rutin maupun hasil laporan masyarakat.

Patroli WTS dan Waria juga telah menjalankan penertiban dengan hasil jangkauan 41 orang WTS yang langsung dirujuk ke Panti Rehabilitasi Mattirodeceng, dan 5 orang waria yang mendapatkan pembinaan keluarga.

Faktor Penghambat : Terhambatnya penyusunan administrasi kegiatan sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan. Selain itu, salah satu penghambat dalam penanganan PMKS jalanan yaitu fasilitas yang dimiliki oleh UPTD RPTC belum lengkap sehingga

masih perlu penambahan fasilitas sehingga dapat memberikan rehabilitasi bagi PMKS dengan lebih maksimal.

Faktor Pendorong : Tim penertiban ODGJ dan Tim Reaksi Cepat selalu siap melakukan tugas dan fungsinya.

Tindak Lanjut : Mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan karena termasuk dalam program prioritas walikota.

Dampak dari tercapainya target kinerja program rehabilitasi sosial yaitu memperlihatkan bahwa program ini sangat perlu untuk terus ditingkatkan pelaksanaannya agar semakin optimal, tidak hanya terkait jumlah tapi juga kualitas pelaksanaan program.

2. Program Penanganan Bencana

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Makanan dan sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial. Indikator capaian yaitu persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial dan target kinerja yaitu 100%. Jumlah anggaran pada program ini yaitu Rp.1.287.398.400,- Realisasi anggaran Rp.796.144.476,- (61,8%) dengan rincian realisasi pada triwulan I Rp. 9.718.296,-, triwulan II Rp. 49.314.396,-, triwulan III Rp. 66.736.740,-, dan triwulan IV Rp. 670.375.044,-. Capaian kinerja yang diperoleh yaitu 100% dengan rincian sebanyak 3.122 KK yang telah diberikan bantuan bencana dari target 2000 KK.

Faktor Penghambat : Masih adanya buffer stock untuk bantuan permakanan bagi korban bencana sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.

Faktor Pendorong : Tim penanganan bencana, dapur umum dan tagana siap melaksanakan tugas dan fungsinya saat terjadi bencana.

Tindak Lanjut : Melengkapi kebutuhan dasar penanganan paska bencana agar kualitas penanganan bencana dapat maksimal.

Dampak dari tercapainya target kinerja program penanganan bencana ini yaitu menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar tanggap dan cepat respon terhadap korban bencana alam atau sosial. Selain program yang memiliki Standar Pelayanan Minimal, Terdapat program utama yang mencapai target kinerja yaitu :

1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. Indikator capaian program ini yaitu persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapat penanganan dan target kinerja 100%. Anggaran program ini pada renja perubahan tahun 2021 sebesar Rp. 203.382.600,-. Realisasi anggaran Rp.53.371.740,- (26,2%), dengan realisasi pada triwulan I Rp. 8.520.864,-, triwulan II Rp13.264.048,-, triwulan III Rp. 18.000.580,-, dan triwulan IV Rp. 13.586.248,-. Capaian kinerja selama tahun 2021 yaitu 6 (enam) orang terlantar di pulangkan ke daerah asalnya. Persentase kinerja mencapai 100% karena total 6 (enam) orang terlantar yang membutuhkan pemulangan ke daerah asalnya telah difasilitasi untuk dikembalikan kepada keluarganya.

Faktor Penghambat : Orang yang mengalami keterlantaran terkadang sulit untuk menyampaikan alamat keluarganya sehingga sulit untuk menentukan lokasi pemulangan. Selain itu, terkadang keluarga tidak mau menerima kembali keluarganya yang terlantar.

Faktor Pendorong : Tim pemulangan orang terlantar selalu siap melakukan tugas dan fungsinya.

Tindak Lanjut : Pelaksanaan kegiatan ini akan berpindah ke Program Rehabilitasi Sosial karena pelaksanaan reunifikasi keluarga merupakan bagian dari rehabilitasi sosial.

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu (1) kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan sub kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar; (2) kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dan sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator capaian berupa persentase anak-anak terlantar yang dipelihara dan target kinerja yaitu 100%. Anggaran program ini pada renja 2021 sebesar Rp.763.508.800,-. Realisasi anggaran Rp. 496.242.344,- (65%), dengan rincian realisasi pada triwulan I Rp.52.166.912,-, triwulan II Rp. 75.574.112,-, triwulan III Rp. 101.202.600,-, dan triwulan IV Rp. 144.900.000,-. Realisasi kinerja pada tahun 2021 yaitu 100% dengan rincian 200 anak miskin mendapatkan bantuan tambahan gizi dan sebanyak 114.711 data mengalami pemutakhiran pada Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Faktor Pendorong : Petugas operator data siap melakukan perbaikan data penerima bantuan.

Tindak Lanjut : Menyelesaikan Peraturan Walikota tentang alur pendataan fakir miskin.

3. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/kota dan 1 sub kegiatan yaitu Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota, dengan indikator capaian yaitu jumlah pengelolaan taman makam pahlawan yang disediakan dan target kinerja yaitu 12 bulan. Anggaran prgoram ini pada Renja Perubahan Tahun 2021 sebesar

Rp. 482.880.400,-. Realisasi anggaran Rp.412.708.544,- (94,7%), dengan rincian realisasi anggaran yaitu pada triwulan I Rp. 9.781.296,-, triwulan II Rp.14.451.396,-, triwulan III Rp. 20.236.740,-, dan triwulan IV Rp. 412.708.544,-. Capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2021 yaitu 100% dengan rincian sebanyak 1 lokasi Monumen Korban 40.000 Jiwa mendapatkan pemeliharaan. 110 orang keluarga legiun veteran, 120 orang keluarga korban 40.000 jiwa dan 2 orang janda perintis kemerdekaan mendapatkan bantuan dalam rangka memperingati hari korban 40.000 jiwa.

Faktor Pendorong : Adanya kerjasama dengan pihak KCVRI dan LVRI sehingga data penerima bantuan bagi keluarga pejuang dapat diperoleh.

Tindak Lanjut : Pemeliharaan monumen korban 40.000 jiwa akan dilakukan setiap bulannya sehingga kebersihan dan kondisi monumen tetap terjaga.

Selain dari program-program yang mencapai target kinerja, terdapat program yang mencapai target kinerja yaitu :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu (1) kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang; (2) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, dan sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator capaian program ini yaitu

persentase masyarakat yang mendapat pemberdayaan sosial dan target kinerja yaitu 100%. Anggaran perubahan pada program ini yaitu sebesar Rp.2.055.559.200,- dan total realisasi anggaran Rp. 1.322.152.598,- (64,3%). Realisasi pada triwulan I yaitu Rp. 61.948.208, triwulan II Rp. 91.525.508, triwulan III Rp. 309.166.020,-, dan triwulan IV Rp.859.512.862,-. Capaian kinerja program ini yaitu 90% dengan rincian sebanyak 72 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang divalidasi oleh tim pengawasan dan validasi kelembagaan, 24 kali Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang, 15 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi, dan 150 keluarga yang diberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif.

Faktor Penghambat : Terhambatnya penyusunan administrasi kegiatan sehingga kegiatan terfokus dilaksanakan pada akhir tahun 2021.

Faktor Pendorong : Adanya tim pengawasan dan validasi kelembagaan yang siap menindaklanjuti permohonan verifikasi lembaga yang akan terdaftar pada Dinas Sosial. Selain itu, sasaran yang menjadi penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif dari Dinas Sosial berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH juga masyarakat miskin yang memiliki usaha.

Tindak Lanjut : Pelaksanaan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif akan berpindah ke Program Perlindungan dan Jaminan Sosial karena telah ada sub kegiatan yang merujuk pada kegiatan tersebut.

Dampak dari tidak tercapainya program pemberdayaan sosial ini yaitu menyebabkan tidak optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial akibat tidak adanya peningkatan kompetensi yang signifikan yang diberikan.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan alokasi anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp. 7.148.806.600,-. Realisasi anggaran Rp.6.562.692.017,- (91,8%) dan capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu :

- a. Indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan). Target kinerja pada tahun 2021 yaitu 90%. Jumlah total kegiatan dan sub kegiatan untuk indikator capaian program ini adalah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik, sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan, sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lainnya. Alokasi anggaran Rp. 872.229.101,90. Persentase capaian kinerja hingga pada tahun 2021 untuk indikator ini yaitu 92% dengan realisasi anggaran Rp. 657.574.515,- (75,4%).

Faktor Pendorong : pada indikator ini terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat rutin seperti honor tenaga kontrak pada sekretariat dinas sosial, pembayaran listrik, air, serta telpon dinas sosial, juga pembayaran bahan bacaan pada dinas sosial.

Faktor Penghambat : Terhambatnya penyusunan administrasi kegiatan sehingga kegiatan yang tidak bersifat rutin belum dapat dilaksanakan.

Tindak Lanjut : Mengikuti alur pelaksanaan kegiatan sehingga pembayaran kegiatan dapat terlaksana sesuai waktunya.

- b. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target kinerja 90%. Jumlah total kegiatan dan sub kegiatan untuk indikator capaian program ini adalah 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 281.822.000,-. Persentase capaian kinerja pada tahun 2021 untuk indikator ini yaitu 87% dengan realisasi anggaran Rp. 218.207.209,- (77,4%).

Faktor Pendorong : pada indikator ini terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat penting untuk pelaksanaan kegiatan lapangan seperti belanja bahan bakar untuk mobil dinas jabatan dan mobil dinas operasional. Selain itu, pelaksanaan pemeliharaan peralatan kantor dilaksanakan guna menunjang kinerja administrasi.

Faktor Penghambat : Terhambatnya penyusunan administrasi kegiatan sehingga kegiatan pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan alat kantor baru dapat direalisasikan pada triwulan IV.

Tindak Lanjut : Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dan alat kantor sesuai dengan waktunya sehingga menghindari kerusakan yang berlebihan.

- c. Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 100%. Jumlah total kegiatan dan sub kegiatan untuk indikator capaian program ini adalah 2 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 5.919.755.498,-. Persentase capaian kinerja pada tahun 2021 untuk indikator ini yaitu 100% dengan realisasi anggaran Rp. 5.616.110.293,- (94,9%)

Faktor Pendorong : Pada indikator ini terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat wajib untuk direalisasikan yaitu

pembayaran gaji dan TPP ASN dinsos dan penatausahaan keuangan.

Faktor Penghambat : Terhambatnya penyusunan administrasi kegiatan sehingga pencairan untuk kegiatan terkait perencanaan terealisasi di triwulan IV.

Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwalnya dan memperbaiki proses administrasi sehingga realisasi keuangan dan kinerja dapat berjalan beriringan.

- d. Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas dengan target kinerja 90%. Jumlah total kegiatan dan sub kegiatan untuk indikator capaian program ini adalah 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 75.000.000,-. Pada APBD perubahan 2 sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dihapuskan anggarannya dan tersisa sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Tidak ada persentase capaian kinerja pada indikator ini karena tidak ada ASN perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas. Realisasi anggaran untuk pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yaitu Rp. 70.800.000,- (94,4%)

Faktor Penghambat : 2 sub kegiatan pada capaian kinerja ini mengalami refocussing anggaran. Sehingga tidak ada ASN yang mengikuti pelatihan ataupun peningkatan kapasitas selama tahun 2021.

Tindak Lanjut : Anggaran untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi ASN sangat diperlukan sehingga telah dianggarkan dan telah direncanakan untuk diikuti pada tahun 2022.

B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 (Triwulan I)

Pada tahun 2022, Dinas Sosial Kota Makassar melaksanakan 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) sub

kegiatan. Dari keseluruhan total program, terdapat 5 (enam) program utama dan 1 (satu) program penunjang/pendukung. Besaran anggaran yang dikelola Dinas Sosial Kota Makassar yaitu Rp. 27.347.146.000,-. Realisasi capaian target kinerja pada triwulan I tahun 2022 sebanyak 3 % sedangkan realisasi keuangan adalah 3,76% yaitu Rp. 1.026.892.062,-. Penyebab masih rendahnya capaian target kinerja program utama adalah karena adanya keterlambatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa.

1. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, dengan indikator capaian yaitu persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan sosial dan target kinerja yaitu 60%. Anggaran pada program ini yaitu sebesar Rp. 997.722.000,-. Realisasi anggaran Rp. 24.760.470,- (2,48%). Capaian kinerja pada triwulan I yaitu 12% dengan rincian sebanyak 12 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang divalidasi oleh tim pengawasan dan validasi kelembagaan.

Faktor Penghambat : Terhambatnya penyusunan administrasi kegiatan sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.

Faktor Pendorong : Tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tinggi sehingga pelaksanaan validasi kelembagaan tetap dapat terlaksana.

Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 20 sub kegiatan, dengan indikator capaian berupa Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti dengan target kinerja 100%. Anggaran program ini yaitu Rp. 2.792.501.145,-. Realisasi anggaran Rp. 24.506.980,-

(0,88%) dan capaian kinerja yang diperoleh pada Triwulan I yaitu 26% dengan rincian sebagai berikut :

- a. 15 orang penyandang disabilitas terlantar yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan rincian :
 - 15 orang mendapatkan layanan data dan pengaduan
 - 15 orang mendapatkan layanan kedaruratan
 - 11 orang mendapatkan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - 1 orang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar
- b. 11 orang anak terlantar yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan rincian :
 - 11 orang mendapatkan layanan data dan pengaduan
 - 11 orang mendapatkan layanan kedaruratan
 - 10 orang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar
 - 1 orang mendapatkan layanan rujukan
- c. 8 orang lanjut usia terlantar yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan rincian :
 - 11 orang mendapatkan layanan data dan pengaduan
 - 11 orang mendapatkan layanan kedaruratan
 - 4 orang diberikan pelayanan penelusuran keluarga
 - 5 orang diberikan pelayanan reunifikasi keluarga
 - 4 orang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar
 - 3 orang mendapatkan layanan rujukan
- d. 6 orang gelandangan dan pengemis yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan rincian :
 - 6 orang mendapatkan layanan data dan pengaduan
 - 6 orang mendapatkan layanan kedaruratan

- 6 orang orang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis
- 2 orang mendapatkan layanan rujukan
- e. 10 orang terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial PMKS lainnya dengan rincian :
 - 10 orang mendapatkan layanan data dan pengaduan
 - 10 orang mendapatkan layanan kedaruratan
 - 1 orang mendapatkan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - 9 orang mendapatkan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Faktor Penghambat : Terhambatnya proses pengadaan barang dan jasa sehingga kegiatan belum terlaksana sesuai jadwal.

Faktor Pendorong : Tim Reaksi Cepat Dinas Sosial siap menindaklanjuti pengaduan yang dilaporkan.

Tindak Lanjut : Mengoptimalkan patroli anak jalanan dan menjalankan proses rehabilitasi sosial dasar di UPTD RPTC.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, dengan indikator capaian berupa Persentase Fakir Miskin Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial yaitu 100%. Anggaran program ini pada renja 2022 sebesar Rp.4.497.976.000,-. Realisasi anggaran Rp. 31.363.262,- (0,70%) dan pada triwulan I belum ada capaian kinerja.

Faktor Penghambat : Terhambatnya penyusunan administrasi kegiatan sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan. Selain itu, proses validasi data dilaksanakan pada bulan maret sehingga belum ada data yang dikelola hingga selesainya triwulan I.

Faktor Pendorong : -

Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

4. Program Penanganan Bencana

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, dengan indikator capaian yaitu Persentase Korban Bencana Alam/Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota dan target kinerja yaitu 100%. Jumlah anggaran pada program ini yaitu Rp. 5.440.310.400,- Realisasi anggaran Rp. 4.952.094,- (0,09%) dan capaian kinerja yang diperoleh pada Triwulan I yaitu 28,6% dengan rincian sebanyak 1.144 KK yang telah diberikan bantuan bencana dari target 4000KK.

Faktor Penghambat : Terhambatnya penyusunan administrasi kegiatan sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.

Faktor Pendorong : Tim penanganan bencana, dapur umum dan tagana siap melaksanakan tugas dan fungsinya saat terjadi bencana.

Tindak Lanjut : Melakukan realisasi keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan tetap melakukan respon cepat atas kejadian bencana.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, dengan indikator capaian yaitu Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik dan target kinerja yaitu 1 Lokasi. Anggaran prgoram ini pada Renja Tahun 2022 sebesar Rp. 349.410.400,-. Realisasi anggaran Rp. 4.952.094,- (1,4%) dan pada triwulan I belum ada capaian kinerja.

Faktor Penghambat : Pelaksanaan kegiatan pada program ini belum di mulai di triwulan 1 sehingga belum ada realisasi kinerja pada triwulan 1.

Faktor Pendorong : -

Tindak Lanjut : Mempersiapkan pengadaan barang bantuan dan dokumen administrasi pemeliharaan monumen korban 40.000 Jiwa.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Makassar

Lembar :

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kota Makassar									Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan)	90%		90%	92%	102%	90%	0%			

1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	-	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	12 Bulan	50%	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ bulan	1 Tahun	1 Tahun	100%	12 Bulan	6	
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	92%	12 Bulan	6	
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6	

1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket						6 Unit	0	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	9 Jenis	7 Jenis	78%	1188 Barang	1			
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Jenis	6 Jenis	100%	1138 Barang	0			
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	9 Jenis	7 Jenis	75%	11 Eksampler	0			
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan				143 Barang	3			
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Kali	5 Kali	100%	11 Kali	8			
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%	18 Jenis	0			
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel						2 Unit	0			
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	14 Unit	0			
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	50%			

1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Bulan	92%	12 Bulan	0	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Bulan	100%	12 Bulan	6	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Bulan	97%	12 Bulan	0	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	90%		77 Unit	100%	90%	3	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		3 Jenis	67%	1 Unit	1	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit		10 Jenis	70%	83 Unit	1	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		35 Unit	75%	35 Unit	1	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit				2 Gedung	0	

1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	60%		60%	54%	90%	60%	21	
1	06	02	2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengumpulan Sumbangan yang Memiliki Izin	60%		24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%	20 Kegiatan	10	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen		24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%	20 Kegiatan	10	
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Berkembang	60%		100 Lembaga	87 Lembaga	87%	103 PSKS	25	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	268 Orang					100 Orang	0	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	0	

1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Lembaga	100 Lembaga	100%	72 LKS	100%	100 Lembaga	25	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Sertifikat					100 Orang	0	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%		100%	100%	100%	100%	39%	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	0%					35%	
						Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti	100%	40%					12%	

1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang		610 Orang	633 Orang	104%	50 Kali	167	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Masyarak	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang		100 Orang	100 Orang	100%	50 Kali	233	
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang					40 Kali	0	
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang					50 Orang	38	

1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang					1 Layanan	501	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang					142 Kegiatan	501	
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang					10 Kali	14	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang					35 Kali	5	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya di Luar Panti Sosial	100%	130 Orang	537 Orang	414%		100%	106	
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang					1 Layanan	149	

1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		230 Orang	480 Orang	177%	20 Kegiatan	149	
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang					20 Orang	0	
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang					1 Paket	0	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang					20 Orang	0	
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang					20 Kali	0	
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang					40 Kali	31	

1	06	04	2.02	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		100 Orang	57 Orang	57%	40 Kali	12	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin Yang Diperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100%		100%	100%	100%	100%	0	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100%		200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	0	
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang		200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	0	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Kota Makassar	100%	100%	30.000 KK	100%	100%	100%	0	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	436.978 Orang		30.000 KK	114.711 KK	100%	100%	0	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	64.443 Keluarga		30.000 KK	0		100%	0	

1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga					50 KK	0	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang					100 KK	0	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	11628 KK	581%	100%	1509	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Orang	2000 Orang	6019 Orang		301%	100%	1509	

1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang					100%	1280		
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit					30 Paket	634		
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang					50 Paket	718		
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	2000 Orang	11628 Orang	581%		28 Kegiatan	0		
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tewujudnya Lumbung Sosial di Lokasi Rawan Bencana	2 Lokasi					100%	0		
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang					100 Orang	0		

1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	1 Lokasi	0	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Monumen Korban 40.000 Jiwa	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	1 Lokasi	0	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam		1 Lokasi	100%	1 Lokasi	0	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Untuk mengukur pencapaian kinerja tahun 2021 pada Dinas Sosial Kota Makassar didasarkan pada pengukuran Kinerja Sasaran dan bukan kepada kinerja hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar di dasarkan pada keberhasilan memenuhi target indikator kinerja yang telah di tetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Kepala Dinas Sosial Kota Makassar dengan Bapak Walikota Makassar.

Program pada Dinas Sosial Kota Makassar terdiri atas urusan wajib (SPM dan Prioritas), urusan pendukung dan urusan penunjang. Dalam penjabaran tersebut Dinas Sosial Kota Makassar mempunyai 3 urusan wajib, 2 urusan pendukung dan 1 urusan penunjang sebagai berikut:

❖ SPM dan Prioritas (Urusan Wajib)

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Penanganan Bencana
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

❖ Program Pendukung (Urusan Pilihan)

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

❖ Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial yaitu :

1. Penanganan anak jalanan yang ditertibkan dan direhabilitasi terkendala dengan belum adanya Perwali terkait yang mengatur anjal dan Lingkungan Pondok Sosial sebagai wadah yang menangani PMKS, serta belum tersedianya tempat pembinaan anak terlantar yang terindikasi menggunakan obat-obatan.
2. Penanganan PMKS terutama orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terlantar belum maksimal, dikarenakan Regulasi yang mengatur belum terbit.

3. Terjaminnya mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerja sama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
4. Teradopsinya kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.

Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial yaitu :

1. Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Belum optimalnya pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
3. Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa, serta lansia terlantar

Tabel T-C.30.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kota Makassar**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
1	Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35%	100%	100%	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12%	100%	100%	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7%	100%	100%	
5	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
6	Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial		60%	60%	60%	70%	70%	80%	80%	90%	35%	60%	60%	

7	Persentase Fakir Miskin Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
8	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	0%	1 Lokasi	1 Lokasi
9	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	44%	90%	90%
10	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%
11	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	83%	90%	90%

2.3 ISU—ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI OPD

Isu-isu penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Sosial Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

- A. Kemiskinan di Kota Makassar merupakan isu penting pertama yang sangat terkait dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Sosial Kota Makassar. Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial diharapkan mampu menyajikan data kemiskinan yang valid sehingga penerima bantuan sosial dapat tepat sasaran. Pada tahun 2022, penerima bantuan sosial di Kota Makassar berjumlah 64.443 keluarga yang terdiri dari penerima PKH dan BPNT.
- B. Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar panti belum dapat terlaksana dengan optimal karena Kota Makassar belum memiliki tempat rehabilitasi sosial yang representatif untuk mendukung pelaksanaannya. Diharapkan pada tahun mendatang, pembangunan tempat rehabilitasi sosial dapat dilakukan.
- C. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar yang belum terlaksana sehingga masyarakat Kota Makassar yang memberi uang di jalanan belum diberikan sanksi dan mengakibatkan jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen semakin meningkat.
- D. Dinas Sosial akan semakin aktif mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar dan dengan dukungan Satpol PP sebagai aparat penegak perda untuk menerapkan sanksi bagi masyarakat yang memberikan uang di jalan dan diharapkan pelaksanaan tersebut dapat menurunkan jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- E. Pelaksanaan penanganan pasca bencana belum optimal karena sarana dan prasarana belum memadai. Sehingga pada tahun depan, Dinas Sosial akan menambah kelengkapan alat untuk penanganan bencana termasuk penyediaan tempat penampungan pengungsi yang layak.

- F. Pada daerah rawan bencana, masyarakat belum memiliki kesadaran dan upaya dalam tanggap bencana sehingga belum terbentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, akan dibentuk kampung siaga bencana di daerah rawan bencana dan melatih masyarakat sekitar terkait mitigasi bencana.
- G. Optimalisasi Fungsi dan Peran Dinas: yaitu Peningkatan Manajemen, Kemampuan Aparatur, Jabatan Fungsional serta Sarana dan Prasarana.
- H. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- I. Kemitraan Sinergis dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui Optimalisasi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Isu-isu strategis di atas, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu kurangnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Dinas Sosial Kota Makassar bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Sosial RI, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Makassar, Organisasi Sosial, serta Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, dan lain sebagainya.

Dinas Sosial Kota Makassar berkeyakinan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Makassar akan semakin baik, hal tersebut didukung oleh beberapa faktor, yaitu :

- C. Komitmen Kepala Daerah Kota Makassar terhadap penanganan permasalahan sosial yang dibuktikan dengan salah satu program strategis Kota Makassar Tahun 2021-2026 yaitu percepatan program jagai ana'ta dan mitigasi sosial.

- D. Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Makassar terhadap permasalahan sosial diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Makassar.
- E. Adanya alokasi anggaran untuk tempat rehabilitasi sosial milik pemerintah Kota Makassar menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar berkomitmen memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang terbaik bagi masyarakatnya.
- F. Tingginya antusiasme masyarakat untuk mendirikan lembaga kesejahteraan sosial sehingga dapat menjadi mitra Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Makassar.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2023, Dinas Sosial Kota Makassar bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yakni Percepatan Program Jagai Ana'ta dan Mitigasi Sosial, dimana pada RKPD tersebut telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung Urusan Wajib pada Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2023. Adapun pagu indikatif untuk Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp. 18.300.225.000,- (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Apabila melihat usulan Dinas Sosial Kota Makassar terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPJMD Kota Makassar Tahun 2023 dan usulan Musrenbang Kota Makassar maka anggaran tersebut belum cukup, sehingga diharapkan anggaran tersebut dapat naik sesuai dengan kebutuhan terkait pelaksanaan kegiatan. Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial Kota Makassar terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi pada Tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, telah diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Makassar membutuhkan anggaran sebesar Rp. 22.907.061.222,- untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023.

Selain itu, terdapat sub kegiatan yang tidak perlu dilaksanakan sesuai hasil analisis kebutuhan yaitu :

- A. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat karena jenis belanja yang berada pada sub kegiatan ini yaitu gaji tenaga kontrak pada Sekretariat Dinas Sosial tidak sesuai dengan indikator kinerja menurut Kepmendagri 050-5889;
- B. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena direncanakan pada tahun 2023, kantor Dinas Sosial Kota Makassar akan dibangun kembali agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kinerja pegawainya;
- C. Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota karena belum ada pergantian TKSK baru dari Kementerian Sosial RI untuk Kota Makassar.

Mengenai perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Dinas Sosial Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kota Makassar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Lembar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Dinsos	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan)	90%	10.363.748.430	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Dinsos	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan)	90%	11.152.213.700	
				90%					90%		
				100%					100%		
				90%					90%		

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	131.771.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	72.565.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	42.933.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.849.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.695.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.469.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.666.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.869.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.717.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.876.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.387.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.414.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	24.796.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.108.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	24.577.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.980.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinsos	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	100%	7.836.159.180	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinsos	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	100%	7.807.167.750
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ bulan	7.373.039.180	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ bulan	7.324.287.750
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	446.760.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	479.280.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	16.360.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	3.600.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinsos	Meningkatnya Kapasitas Pegawai Dinas Sosial	100%	105.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinsos	Meningkatnya Kapasitas Pegawai Dinas Sosial	100%	269.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	145 Paket	78.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	145 Paket	96.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinsos	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	27.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinsos	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	173.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinsos	Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	438.970.750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinsos	Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	482.351.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	4.184.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	3.165.500

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	70.411.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	99.495.800
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinsos	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	34.718.750	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinsos	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	14.245.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	48.400.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	52.827.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinsos	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	38.737.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinsos	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	25.476.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	10.620.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	7.080.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	15.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	15.061.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	216.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	265.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinsos	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100%	163.600.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinsos	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100%	525.243.000

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	163.600.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	525.243.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.194.204.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.585.792.800	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	378.229.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	192.029.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	122.050.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	623.946.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.463.742.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	90%	493.443.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	90%	410.093.750	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.163.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52.066.250
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	319.670.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	328.387.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	41.470.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	29.640.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	96.140.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinsos	Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	60%	1.455.180.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinsos	Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	60%	688.128.200
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Meningkatnya Pengumpulan Sumbangan yang Memiliki Izin	60%	57.000.000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Meningkatnya Pengumpulan Sumbangan yang Memiliki Izin	60%	21.804.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dinsos	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen	57.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dinsos	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen	21.804.000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Berkembang	60%	1.398.180.600	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Berkembang	60%	666.324.200
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	268 Orang	492.393.600	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	268 Orang	364.069.200
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	446.862.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	-

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Lembaga	429.080.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Lembaga	273.080.000
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dinsos	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Sertifikat	29.845.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dinsos	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Sertifikat	29.175.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Makassar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	3.748.972.720	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Makassar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	4.469.617.470
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Makassar	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	3.012.802.301	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Makassar	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	3.425.753.050

		Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti	100%				Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti	100%		
		Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%				Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%		
		Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%				Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		
Penyediaan Permakanan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	523.745.000	Penyediaan Permakanan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	429.172.000	
Penyediaan Sandang	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	78.050.000	Penyediaan Sandang	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	86.088.000	

Penyediaan Alat Bantu	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	166.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	96.228.300
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	198.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	213.500.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	561.297.600	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	817.020.000
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	136.788.501	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	123.534.000

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	9.600.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	7.600.000
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	180.000.000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	10.600.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	83.467.200	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	117.737.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	1.015.904.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	1.204.961.250

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kabupaten/Kota	50 Orang	5.500.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kabupaten/Kota	50 Orang	8.400.000
Pemberian Layanan Rujukan	Kota Makassar	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kabupaten/Kota	150 Orang	54.450.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Makassar	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kabupaten/Kota	150 Orang	310.912.500
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Makassar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya di Luar Panti Sosial	100%	736.170.419	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Makassar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya di Luar Panti Sosial	100%	1.043.864.420
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kabupaten/Kota	100 Orang	42.399.600	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kabupaten/Kota	100 Orang	103.511.500
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kabupaten/Kota	100 Orang	274.020.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kabupaten/Kota	100 Orang	320.456.250

Penyediaan Perumahan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	39.955.000	Penyediaan Perumahan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	91.551.520
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	2.278.795	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	6.968.900
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	241.217.024	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	360.966.250
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	36.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5.600.000

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	56.600.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	107.200.000	
Pemberian Layanan Rujukan	Kota Makassar	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	43.700.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Makassar	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	47.610.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Makassar	Persentase Fakir Miskin Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100%	1.682.009.600	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Makassar	Persentase Fakir Miskin Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100%	3.431.301.120	
Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Makassar	Terlaksananya Pemeliharaan Anak Terlantar	100%	272.013.600	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Makassar	Terlaksananya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100%	608.935.000	
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Makassar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	272.013.600	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Makassar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	608.935.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Kota Makassar	100%	1.409.996.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Kota Makassar	100%	2.822.366.120	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	436.978 Orang	595.755.200	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	436.978 Orang	428.404.000	

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	64.443 Keluarga	102.320.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	64.443 Keluarga	104.891.000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Makassar	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	409.420.400	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Makassar	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	1.585.807.200
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Makassar	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	302.500.400	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Makassar	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	703.263.920
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Makassar	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.233.611.400	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Makassar	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.981.610.632
Perlindungan Sosial Korban Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.097.420.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.665.660.632

Penyediaan Makanan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Orang	941.900.000	Penyediaan Makanan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Orang	974.339.600
Penyediaan Sandang	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	48.250.000	Penyediaan Sandang	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	252.837.600
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Makassar	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	22.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Makassar	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	212.990.232
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	80.000.000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	171.827.200

Pelayanan Dukung Psikososial	Kota Makassar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	5.270.000	Pelayanan Dukung Psikososial	Kota Makassar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	53.666.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Biringkanaya, Katimbang Kota Makassar, Manggala, Manggala	Tewujudnya Lumbung Sosial di Lokasi Rawan Bencana	2 Lokasi	136.191.400	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Biringkanaya, Katimbang Kota Makassar, Manggala, Manggala	Tewujudnya Lumbung Sosial di Lokasi Rawan Bencana	2 Lokasi	315.950.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Makassar, Biringkanaya, Katimbang Kota Makassar, Manggala, Manggala	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	136.191.400	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Makassar, Biringkanaya, Katimbang Kota Makassar, Manggala, Manggala	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	315.950.000

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Makassar, Tallo, La'latang	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	1 Lokasi	459.990.400	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Makassar, Tallo, La'latang	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	1 Lokasi	1.184.190.100
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Tallo, La'latang	Terpeliharanya Monumen Korban 40.000 Jiwa	1 Lokasi	459.990.400	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Tallo, La'latang	Terpeliharanya Monumen Korban 40.000 Jiwa	1 Lokasi	1.184.190.100
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Tallo, La'latang	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	459.990.400	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Tallo, La'latang	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1.184.190.100

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Salah satu usulan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Makassar diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD yang langsung dtujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrembang Kota dan Pokir DPRD Kota Makassar. Penelahaan usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Makassar

Nama SKPD : Dinas Sosial Kota Makassar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan Kain Kafan, Dengan Vol. 28 Unit. Anggaran 8.400.000	Jl. Baji Ati I No. 2 (Kantor Lurah), Kota Makassar	Jumlah bantuan kain kafan dan alat permandian mayat yang diadakan	28 Unit	Usulan diakomodir, dengan syarat bantuan disalurkan melalui Dinas Sosial (Usulan Musrenbang)
2	Pengadaan Kain Kafan, Volume 20, Anggaran: 6.000.000	Jl. BAJI PAMAI NO.8A RT.01 RW.01, Kota Makassar	Jumlah bantuan kain kafan dan alat permandian mayat yang diadakan	20 Unit	Usulan diakomodir, dengan syarat bantuan disalurkan melalui Dinas Sosial (Usulan Musrenbang)
3	Bantuan Kain Kafan Dan Alat Mandi Jenazah Di Wilayah Kelurahan Lembo Sebanyak 50 Unit Dan Anggaran Rp.15.000.000 Kegunaan Dari Bantuan Ini Untuk Membantu Masyarakat Yang Telah Meninggal Dunia	Jalan Sunu Blok Kota Kom.Unhas CX.1A, Makassar	Jumlah bantuan kain kafan dan alat permandian mayat yang diadakan	50 Unit	Usulan diakomodir, dengan syarat bantuan disalurkan melalui Dinas Sosial (Usulan Musrenbang)
4	(Prioritas 13 / DANA SEKTORAL / DINAS SOSIAL) Warga membutuhkan alat dan kelengkapan jenazah untuk disiapkan	Masjid Al Aqsha Jl. Maipa, Kota Makassar	Jumlah bantuan kain kafan dan alat permandian mayat yang diadakan	15 Unit	Usulan diakomodir, dengan syarat bantuan disalurkan melalui Dinas Sosial (Usulan Musrenbang)
5	Bantuan Kain Kafan Dan Alat Mandi Jenazah Bagi Warga Yang Kurang Mampu Volume:50 Unit Rp.25.000.000,00	Jl.G.Merapi (Mesjid Nurul Majid) RT.001 RW.005, Kota Makassar	Jumlah bantuan kain kafan dan alat permandian mayat yang diadakan	50 Unit	Usulan diakomodir, dengan syarat bantuan disalurkan melalui Dinas Sosial (Usulan Musrenbang)

Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan, Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode itu. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar ini diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyeksi Prioritas.

Dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024 yang terkait dengan Kementerian Sosial, yaitu agenda kedua yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; agenda ketiga yaitu Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing; agenda keempat yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; serta agenda ketujuh Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

Permasalahan mendasar dalam pembangunan kesejahteraan sosial yaitu terkait dengan peningkatan kemampuan dasar penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesejahteraan sosial yang efisien dan bermutu masih belum optimal. Dalam pelayanan dan perlindungan sosial di daerah terpencil dan tertinggal, daerah perbatasan masih perlu ditingkatkan. Permasalahan yang terjadi disebabkan karena jumlah, kualitas, dan pemerataan SDM kesejahteraan yang masih belum memadai. Adapun tantangan utama pembangunan kesejahteraan sosial dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan masih rendah
2. Kualitas layanan yang belum berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial
3. tata kelola serta birokrasi yang belum efektif

Dengan mempertimbangkan tantangan tersebut, serta kondisi lingkungan strategis yang dihadapi, pembangunan nasional 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran pokok/utama pembangunan yaitu:

1. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
6. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan amanah dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana sebagai salah satu negara anggota PBB yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, maka dalam pelaksanaannya perlu ada keselarasan dengan Rencana Pembangunan di daerah. SDGs atau TPB memiliki 17

tujuan yang mana berdasarkan hasil telaahan maka Dinas Sosial Kota Makassar mendukung Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan dan Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan.

Pada tujuan 1 yaitu Tanpa Kemiskinan, TPB menekankan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga tidak ada lagi penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Pada tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan, Ketimpangan ekonomi di Kota Makassar masih relatif tinggi, khususnya di tengah pandemi Covid- 19, salah satu parameternya adalah angka rasio gini yang mengalami kenaikan dari 0,383 tahun 2018, kemudian ke 0,390 tahun 2019 dan di tahun 2020 sampai 0,400. Kesenjangan pendapatan justru semakin melebar disaat ekonomi Kota Makassar tumbuh di atas Provinsi Sulawesi Selatan (sebelum pandemi).

Potensi dan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Sosial Kota Makassar merupakan modal dasar dalam rangka pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu, kualitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kota Makassar perlu ditingkatkan agar mereka mampu berperan secara aktif dalam memberikan pelayanan kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka peningkatan taraf kehidupan menuju masyarakat Makassar yang bermartabat.

Dinas Sosial Kota Makassar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Walikota Makassar dengan Visi “Pengendalian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial” yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Sosial.

Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya kebutuhan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan dan kebutuhan sosial dasar lainnya. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS membutuhkan pengolahan tersendiri, karena

jangkauan dan populasi sasaran yang luas membutuhkan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.

PMKS masih menghadapi kendala dalam mendapatkan akses ke pelayanan sosial, begitupun dengan penyandang disabilitas yang masih menghadapi kendala dalam hal kemandirian, produktivitas dan hak hidup normal, serta gelandangan, pengemis dan tuna susila selain disebabkan oleh kemiskinan, juga diakibatkan oleh ketidakmampuan individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial. Kemampuan Pemerintah dan Masyarakat belum dapat menjangkau semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial ke depan harus lebih diperkuat dengan mengedepankan peran aktif masyarakat, diikuti dengan pengalihan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan Pemerintah dan Masyarakat sehingga fungsi sosial dari PMKS dapat ditingkatkan agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam penanganan masalah Kesejahteraan Sosial (baik sarana dan prasarana, maupun anggaran) telah mendorong bergesernya paradigma pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan lebih mengefektifkan sistem perlindungan sosial melalui pelayanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial serta program kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak negatif dari berbagai kebijakan pembangunan nasional.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa permasalahan Kesejahteraan Sosial masih akan didominasi oleh permasalahan “konvensional” terutama kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketertinggalan, ketentuan sosial dan penyimpangan perilaku, serta akibat bencana. Namun demikian, permasalahan “aktual” yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial dan kesenjangan sosial perlu memperoleh perhatian yang serius dan berkelanjutan. Demikian pula permasalahan Kesejahteraan Sosial “hulu” dan dampak pelaksanaan berbagai bidang pembangunan lain secara intensif perlu ditangani melalui berbagai cara.

Apabila hal ini luput dari perhatian, resiko-resiko yang potensial yang terjadi akan menjadi beban yang sangat berat, baik terhadap meningkatnya beban “murni Kesejahteraan Sosial” maupun permasalahan yang bersifat lebih “makro” yang terkait dengan masalah pembangunan lainnya. Memperhatikan gambaran di atas, maka masalah prioritas Kesejahteraan Sosial diarahkan pada kemiskinan, ketunaan sosial, keterlantaran, kecacatan, kebencanaan, keterpencilan, tindak kekerasan dan kerentanan sosial.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran dan kebijakan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Visi Kota Makassar 2021-2026 adalah *“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere’ dan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk Semua”*. Berdasarkan Visi Kota Makassar tersebut kemudian dijabarkan kedalam Misi Kota Makassar Tahun 2021-2026, adapun Misi tersebut yaitu :

1. Revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi;
2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua;
3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang Sombere’ dan Smart City untuk Semua.

Berdasarkan penjabaran atas Visi dan Misi Kota Makassar Tahun 2021-2026 diatas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar terkait dengan misi ke-2 yaitu Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua yang memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial;
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata;

Berdasarkan paparan mengenai tujuan dari misi ke-2 diatas, Dinas Sosial Kota Makassar secara langsung terkait dengan tujuan ke-1 yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial. Pada tujuan ke-1 terdapat 2 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Miskin.

Dinas Sosial Kota Makassar terkait langsung dengan sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Miskin, yang mana pada sasaran tersebut memiliki strategi yaitu Penyediaan peluang kerja dan peluang bisnis baru bagi masyarakat miskin serta perluasan perlindungan sosial melalui kepesertaan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan yang tepat sasaran.

Merujuk pada tujuan dan sasaran turunan dari Visi Misi Kota Makassar sesuai pada RPJMD tahun 2021-2026, maka Dinas Sosial Kota Makassar merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial yaitu :

1. Tujuan : Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat miskin
Indikator Tujuan : Akses pelayanan sosial bagi masyarakat miskin
 - a. Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart
Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - b. Sasaran : Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan
Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin
Indikator Tujuan : Meningkatnya fungsi sosial masyarakat miskin terkait pemenuhan kebutuhan dasar
Sasaran : Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat miskin
 - a. Indikator Sasaran : Persentase pengelolaan data kemiskinan
 - b. Indikator Sasaran : Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - c. Indikator Sasaran : Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2023 berdasarkan beberapa faktor seperti Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yaitu pada program rehabilitasi sosial dan program penanganan bencana; selanjutnya Dinas Sosial terkait langsung dengan program prioritas walikota yaitu percepatan program jagai ana'ta dan mitigasi sosial yang mana berkaitan langsung dengan program rehabilitasi sosial dan program perlindungan dan jaminan sosial. Terkait program prioritas Walikota, Dinas Sosial turut mendukung pelaksanaan Lorong Wisata melalui program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, dan program perlindungan dan jaminan sosial.

Dinas Sosial turut dalam pelaksanaan program nasional seperti program penurunan stunting dan Pengentasan Anak Tidak Sekolah yang dilaksanakan melalui program perlindungan dan jaminan sosial, dan pada indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dinas Sosial mengambil peran pada tujuan 1 yaitu Tanpa Kemiskinan dan tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan melalui program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, serta program perlindungan dan jaminan sosial.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2023 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Makassar dengan total jumlah program yaitu 6 (enam) program dengan 5 (lima) program utama dan 1 (satu) program penunjang. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 berjumlah 16 (enam belas) kegiatan dan total pagu yaitu Rp. 22.907.061.222. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Penunjang

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Makaverse)
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Makaverse)
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Utama

a. Program Pemberdayaan Sosial

- Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (SDGs)
- Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota (SDGs dan Longwis)

b. Program Rehabilitasi Sosial

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (SPM, Longwis, SDGs, Penanggulangan Kemiskinan, dan Disabilitas)
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (Longwis, SDGs, dan Penanggulangan Kemiskinan)

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar (ATS, Stunting, Longwis, dan Penanggulangan Kemiskinan)
- Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Stunting, SDGs, Penanggulangan Kemiskinan, dan ATS)

d. Program Penanganan Bencana

- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (SPM, SDGs, dan Penanggulangan Kemiskinan)
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota (SDGs)

- e. Program Pemeliharaan Taman Pahlawan
 - Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Makassar

Lembar :

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kota Makassar		Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				22.907.061.222					21.182.766.864
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan)	Dinsos	90%	11.152.213.700	APBD			90%	12.930.919.090
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		90%					90%	

79

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	1 Dokumen	9.414.000	APBD	1 Dokumen	9.414.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	1 Laporan	5.108.000	APBD	1 Laporan	5.108.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	4 Laporan	5.980.000	APBD	4 Laporan	5.980.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	Dinsos	100%	7.807.167.750	APBD	100%	9.475.355.890
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	60 Orang/ bulan	7.324.287.750	APBD	60 Orang/ bulan	8.992.475.890
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	100 Dokumen	479.280.000	APBD	100 Dokumen	479.280.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinsos	2 Laporan	3.600.000	APBD	2 Laporan	3.600.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pegawai Dinas Sosial	Dinsos	100%	269.000.000	APBD		100%	306.500.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinsos	145 Paket	96.000.000	APBD		145 Paket	96.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinsos	11 Orang	173.000.000	APBD		11 Orang	210.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinsos	100%	482.351.400	APBD		100%	482.351.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinsos	25 Paket	3.165.500	APBD		25 Paket	3.165.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinsos	42 Paket	99.495.800	APBD		42 Paket	99.495.800
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinsos	2 Paket	14.245.400	APBD		2 Paket	14.245.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinsos	33 Paket	52.827.500	APBD		33 Paket	52.827.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinsos	6 Paket	25.476.000	APBD		6 Paket	25.476.000

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinsos	72 Dokumen	7.080.000	APBD	72 Dokumen	7.080.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinsos	11 Laporan	15.061.200	APBD	11 Laporan	15.061.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	5 Laporan	265.000.000	APBD	5 Laporan	265.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Dinsos	100%	525.243.000	APBD	100%	486.828.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinsos	34 Unit	525.243.000	APBD	20 Unit	486.828.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	100%	1.585.792.800	APBD	100%	1.702.542.800
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinsos	12 Laporan	122.050.000	APBD	12 Laporan	113.200.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinsos	12 Laporan	1.463.742.800	APBD	12 Laporan	1.589.342.800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	Dinsos	90%	410.093.750	APBD	90%	404.226.000

84

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kota Makassar	100%	4.469.617.470	APBD	SPM, Longwis, dan SDGs	100%	3.490.665.374
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Kota Makassar	100%	3.425.753.050	APBD	SPM, Longwis, dan SDGs	100%	2.878.708.500
	Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti		100%					
	Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		100%					
	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		100%					
Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/kota	Kota Makassar	200 Orang	429.172.000	APBD	SPM, Longwis, dan SDGs	200 Orang	454.197.000

	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	20 Orang	5.600.000	APBD	SDGs	20 Orang	36.000.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	40 Orang	107.200.000	APBD	SDGs	40 Orang	56.600.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	25 Orang	47.610.000	APBD	SDGs	25 Orang	43.700.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Perentase Fakir Miskin Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Kota Makassar	100%	3.431.301.120	APBD	Prioritas Longwis, dan SDGs	100%	2.195.496.400
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Makassar	100%	608.935.000	APBD	ATS, Longwis, dan SDGs	100%	272.013.600
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	200 Orang	608.935.000	APBD	ATS, Stunting, Longwis dan SDGs	200 Orang	272.013.600
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Kota Makassar	Kota Makassar	100%	2.822.366.120	APBD	Stunting, ATS, dan SDGs	100%	1.923.482.800
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Makassar	436.978 Orang	428.404.000	APBD	Stunting, ATS, dan SDGs	436.978 Orang	595.755.200

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	100 Orang	252.837.600	APBD	SPM dan SDGs	100 Orang	48.250.000
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Makassar	3 Unit	212.990.232	APBD	SPM dan SDGs	3 Unit	22.000.000
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kota Makassar	100 Orang	171.827.200	APBD	SPM dan SDGs	100 Orang	80.000.000
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Makassar	500 Orang	53.666.000	APBD	SPM dan SDGs	500 Orang	100.000.000
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Biringkanaya, Katimbang Kota Makassar, Manggala, Manggala	2 Lokasi	315.950.000	APBD		2 Lokasi	136.191.400

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Kota Makassar akan melaksanakan 6 (enam) program pada tahun 2023 dengan rincian 5 (lima) program utama dan 1 (satu) program penunjang. Penjelasan singkat mengenai pelaksanaan program Dinas Sosial pada tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Pada program ini terdapat gaji dan tunjangan bagi ASN serta belanja modal dan belanja jasa lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan program-program utama Dinas Sosial.
- **Program Pemberdayaan Sosial**
Fokus pelaksanaan kegiatan pada program ini yaitu pada pemberdayaan sosial bagi pelaku kesejahteraan sosial baik pelaksana undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Lembaga Konsultansi Kesejahteraan Keluarga).
- **Program Rehabilitasi Sosial**
Program ini termasuk dalam kategori SPM, Prioritas Walikota, dan SDGs yang mana pelaksanaan kegiatannya berfokus pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar panti sosial. Kegiatan-kegiatannya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar PMKS seperti makanan, sandang, rujukan, reunifikasi keluarga dan lain sebagainya yang sesuai dengan hasil asesmen.
- **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Kegiatan yang terdapat pada program ini berfokus pada pemberian bantuan bagi anak-anak terlantar yang berada dalam keluarga, dan data fakir miskin. Pelaksanaan musyawarah kelurahan sebagai kegiatan untuk *updating* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berada pada program ini. Melalui pelaksanaan muskel diharapkan data yang diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Kementerian Sosial maupun instansi lainnya yang menggunakan DTKS dapat sesuai dengan kondisi terkini sehingga bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran. Selain itu, pada program ini terdapat pelaksanaan kegiatan pemberian

bantuan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

- Program Penanganan Bencana

Program ini merupakan program SPM yang berfokus pada pemberian bantuan paska bencana sehingga korban bencana alam maupun sosial dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, sandang, tempat penampungan pengungsi dan lain sebagainya sesuai hasil asesmen. Selain itu, pada tahun 2023 akan dibentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di 2 (dua) kecamatan rawan banjir agar terbentuk lumbung sosial dan kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana.

- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini berfokus pada pemeliharaan monumen korban 40.000 jiwa sebagai lokasi bersejarah di Kota Makassar. Pada tahun 2023, akan dilakukan rehabilitasi pada gedung-gedung serta gudang yang berada pada lingkungan monumen sehingga dapat digunakan dengan baik dan dapat menjadi objek wisata edukasi bagi pelajar.

Rincian rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																
Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							22,907,061,222		21,743,136,864			
											11,152,213,700		13,044,427,090			
											72,565,000		73,115,000			
1	06	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	2 Dokumen	11 Dokumen	25,849,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	26,399,000
1	06	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	1 Dokumen	11 Dokumen	8,469,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	8,469,000
1	06	01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	1 Dokumen	11 Dokumen	7,869,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	7,869,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	1 Dokumen 11 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9,876,000		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas 90 % Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah 100 % Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 90 %	9,876,000
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	1 Dokumen 11 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9,414,000		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas 90 % Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah 100 % Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 90 %	9,414,000
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	1 Laporan 11 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5,108,000		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas 90 % Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah 100 % Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 90 %	5,108,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	4 Laporan	11 Dokumen	5,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	5,980,000
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,807,167,750				9,475,355,890
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	60 Orang/bulan	100 %	7,324,287,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	8,992,475,890
1 06 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	100 Dokumen	100 %	479,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	479,280,000

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial														
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Percentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	2 Laporan	100 %	3.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Percentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Percentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	3.600.000
	1 06 01	2.02 07												
										269.000.000				396.500.000
	1 06 01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Percentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Percentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Percentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya Kapasitas Pegawai Dinas Sosial	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	145 Paket 100 % 90 %	96.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Percentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Percentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	96.000.000
	1 06 01	2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Percentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Percentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Percentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kapasitas Pegawai Dinas Sosial	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	11 Orang 100 % 90 %	173.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Percentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Percentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	210.500.000
	1 06 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							482.351.400				482.351.400

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial				Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	25 Paket	100 %	3.165.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarna aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	3.165.500
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perfengkapan Kantor	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Peralatan dan Perfengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	42 Paket	100 %	99.495.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	99.495.800
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	2 Paket	100 %	14.245.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	14.245.400

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Ukurl	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	33 Paket	100 %	52.827.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas 90 % Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah 100 % Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 90 %		52.827.500
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	6 Paket	100 %	25.476.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas 90 % Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah 100 % Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 90 %		25.476.000
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	72 Dokumen	100 %	7.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas 90 % Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah 100 % Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 90 %		7.080.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhi Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	11 Laporan	100 %	15,061,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	15,061,200
1 06 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhi Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	5 Laporan	100 %	265,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	265,000,000
1 06 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								525,243,000				502,196,000
1 06 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	34 Unit	100 %	525,243,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	486,828,000
1 06 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,585,792,800				1,704,542,800

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	12 Laporan	100 %	122.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	113.200.000
1 06 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum, Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	12 Laporan	100 %	1.463.742.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	1.589.342.800
1 06 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	1 Unit	90 %	52.066.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	51.620.000
									410.093.750				500.366.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	62 Unit	90 %	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	311,136,000	
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	90 % 100 % 90 %	37 Unit	90 %	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	41,470,000	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL												688,128,200	1,224,216,200
1 06 02 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota												21,804,000	21,804,000
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Meningkatnya Pengumpulan Sumbangan yang Memiliki Izin	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	20 Dokumen	60 %	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	60 %	21,804,000	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota												666,324,200	1,202,412,200
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Berkembang	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	268 Orang	60 %	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	60 %	367,610,200	
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Berkembang	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	100 Lembaga	60 %	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	60 %	339,580,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Berkembang	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	75 Sertifikat	60 %	29.175.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	60 %	48.360.000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								4.469.617.470				3.490.665.374
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								3.425.753.050				2.878.708.500
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
		Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sosial dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	200 Orang	100 %	429.172.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti	100 % 100 % 100 % 100 %	454.197.000
		Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti									Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
		Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
		Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	200 Orang	100 %	86.088.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti	100 % 100 % 100 % 100 %	86.088.000
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti									Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
		Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	30 Orang	100 %	96.228.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 % 100 % 100 % 100 %	166.000.000
1 06 04 2.01 04	Pembinaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	50 Orang	100 %	213.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 % 100 % 100 % 100 %	213.500.000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
			Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
			Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti									Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti			
1 106 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	200 Orang	100 %		817.020.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			577.770.000	
			Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
			Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
1 106 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	200 Orang	100 %		123.534.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			61.813.600	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial												
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti										
		Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kawenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	20 Orang	100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9,600,000
1 06 04 2 01 07	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti										
		Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti										
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti										
		Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kawenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	30 Orang	100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9,000,000
1 06 04 2 01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti										
		Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti										

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial												
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti								Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
		Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti								Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti		
		Persentase lanjut usia terdantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti								Persentase lanjut usia terdantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	200 Orang	100 %	117.737.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		66.323.400
		Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti								Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti								Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
		Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti								Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti		
		Persentase lanjut usia terdantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti								Persentase lanjut usia terdantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedururatan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedururatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	200 Orang	100 %	1.204.961.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.015.904.000
		Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti								Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial												
Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	50 Orang 100 %	8.400.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	8.400.000	
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	150 Orang 100 %	310.912.500 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	210.112.500	
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							1.043.864.420			611.956.874	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	103.511.500	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti 100 % 100 % Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100 % Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	86.766,100
						100 %							
						100 %							
						100 %							
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	320.456.250	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti 100 % 100 % Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100 % Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	77.718,750
						100 %							
						100 %							
						100 %							

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
		Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti									Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti		
		Persentase lanjut usia terdilar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti									Persentase lanjut usia terdilar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
		Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Perumahan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya di Luar Panti Sosial	Kota Makassar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 Orang	100 %	91.551.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39.955.000
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
		Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti									Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti		
		Persentase lanjut usia terdilar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti									Persentase lanjut usia terdilar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
		Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya di Luar Panti Sosial	Kota Makassar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	300 Orang	100 %	6.968.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 Orang	100 %	360.966.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	241.217.024
1 06 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase penyandang diabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	20 Orang	100 %	5.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	36.000.000

Tahun 2023

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja					
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Percentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									Percentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
			Percentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti									Percentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti						
			Percentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti									Percentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti						
			Percentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									Percentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti						
1 06 04 2.02 12		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	100 %					107.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		56.600.000			
1 06 04 2.02 13		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya di Luar Panti Sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	100 %					47.610.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43.700.000			
1 06 05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														3.431.301.120		2.195.496.400
1 06 05 2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar														608.935.000		272.013.600
1 06 05 2.01 03		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Percentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpilihra Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Orang	100 %			608.935.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	272.013.600			
1 06 05 2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														2.822.366.120		1.923.482.800

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target		
1	06	05	2.02	01	Perentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	436978 Orang	100 %		Perentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100 %	595,755,200	
1	06	05	2.02	02	Perentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	64443 Keluarga	100 %		Perentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100 %	102,320,000	
1	06	05	2.02	03	Perentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Keluarga	100 %		Perentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100 %	922,907,200	
1	06	05	2.02	04	Perentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %		Perentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100 %	302,500,400	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA											1,328,341,400
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											1,192,150,000
					Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4000 Orang	100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	941,900,000
					Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	48,250,000

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	22.000.000
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	80.000.000
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan psikososial	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	100 %	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100.000.000
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								315.950.000				136.191.400
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Saiga Bencana	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah tanggap Darurat Bencana Daerah Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Saiga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Tewujudnya Lumbung Sosial di Lokasi Rawan Bencana	Kota Makassar, Biringkanaya, Kalimabang Kota Makassar, Manggala, Manggala	100 %	150 Orang	2 Lokasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota	100 %	136.191.400
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								1.184.190.100				459.990.400
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								1.184.190.100				459.990.400

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Monumen Korban 40.000 Jiwa	Kota Makassar Tallo, La'tatang	100 %	1 Makam	100 %	1.184.190.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	100 %	459.990.400
TOTAL									22.907.061.222					21.743.136.864

BAB V PENUTUP

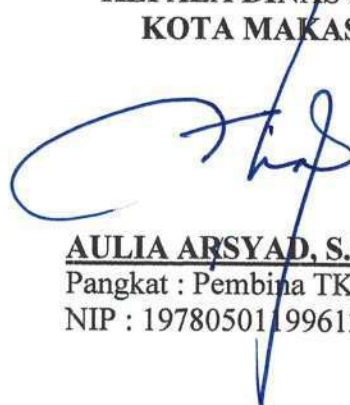
Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2023 disusun melalui pembahasan bersama baik dengan seluruh komponen organisasi maupun stakeholder lain yang bersifat koordinatif dengan Dinas Sosial. Saran dan masukan dari seluruh pihak terkait akan menjadikan pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2023 terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dokumen Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman kerja oleh seluruh unsur pada Dinas Sosial Kota Makassar sehingga dapat terbangun komitmen bersama dalam mencapai Visi Misi Pemerintah Kota Makassar. Melalui dokumen renja ini diharapkan para pegawai dapat melaksanakan tupoksinya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Selanjutnya, dokumen renja ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial yang diharapkan dapat konsisten sesuai dengan yang telah tertuang dalam dokumen ini. Selain itu, diharapkan kinerja-kinerja maksimal dari seluruh sumber daya yang terdapat pada Dinas Sosial untuk mengaktualisasikan renja ini.

Makassar, 4 Agustus 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MAKASSAR**



AULIA ARSYAD, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 197805011996122001